

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Dye, T. R. (2002). *Understanding Public Policy*. Pearson.
- Indra, M. (2019). *Implementasi Kebijakan Publik*. Medan: Medan Persada.
- Pramono, J. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: Unisri Press.
- Pramono, Y. (2020). *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Tachjan, H. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI).
- Tahir, A. (2021). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Tahir, R. (2021). *Teori dan Praktik Implementasi Kebijakan*. Bandung: CV. Mandiri.
- Wibawa, S. (2012). *Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Pustaka Ilmiah.

### **Jurnal**

- Amzar, A. (2016). "Penerapan kualitas pelayanan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak." *Jurnal JOM FISIP*, 3(1).
- Hasyem, M., Larasati, E., Suwitri, S., & Warsono, H. (2022). "Implementasi penyaluran dan penetapan dana desa (studi kasus di Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara)." *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 10(2), 527–544.
- Laila, A., HB, G., & Zulwisman. (2024). "Implementasi pelayanan publik pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) di Kabupaten Bengkalis." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(16), 111–122.
- Lestari, M. (2022). "Hambatan implementasi kebijakan pembuatan E-KTP di daerah." *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(1), 45–55.
- Sebayang, S. D. D. B. R. (2023). "Faktor penyebab keterlambatan pembuatan E-KTP di Kantor Dinas Catatan Sipil Tanah Karo." *Jurnal Administrasi Publik*, 12(2), 67–78.
- Suryanto, T. (2015). Efektivitas pelaksanaan kebijakan program KTP elektronik di Kabupaten Semarang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 101–112.

### **Skripsi**

- Girsang, V. S. (2024). *Kualitas pelayanan publik dalam pengurusan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun*. Skripsi, Universitas Medan Area.
- Mahfudl. (2022). *Pelayanan pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP)*

pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pidie Jaya. Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Putera, P. E. (2020). Implementasi pelayanan publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap pembuatan E-KTP Kabupaten Kepulauan Meranti. Skripsi, Universitas Islam Riau.

#### Peraturan Perundang-Undangan

Kementerian Dalam Negeri. (2011). Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011.

Kementerian Dalam Negeri. (2013). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Kementerian Dalam Negeri. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018.

Kementerian PANRB. (2017). Keputusan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan.

Pemerintah Kabupaten Simalungun. (2022). Peraturan Bupati Simalungun No. 9 Tahun 2022 tentang Pelayanan Perekaman dan Pencetakan E-KTP.

Kementerian Dalam Negeri. (2011). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan.

Pemerintah Indonesia. (2009). Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis Teknologi Biometrik.

Pemerintah Indonesia. (2009). Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

#### Berita Online

Go Sumut. (2023). "Praktik pungutan liar dalam pelayanan publik di Indonesia." Diakses dari <https://gosumut.com>.

Tribun Medan. (2023). "Laporan praktik pungli dalam perekaman data E-KTP." Diakses dari <https://medan.tribunnews.com>